

I. PEDOMAN RATING

A. PENDAHULUAN

Kadin Indonesia memiliki struktur organisasi yang meliputi Kadin tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota serta mewadahi Asosiasi/ Himpunan di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi dunia usaha, Kadin dan Asosiasi/ Himpunan berkewajiban memajukan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik secara sektoral, lintas sektor dan aspiratif.

Pengelolaan organisasi Kadin & Asosiasi/Himpunan secara profesional menjadi tantangan utama seiring dengan perubahan lingkungan global dan lokal, serta tuntutan utama sebagai lembaga publik maupun guna melayani anggotanya. Menjawab tantangan dan tuntutan tersebut, Kadin Indonesia dalam program kerja Rapimnas Kadin 2008 dan dikukuhkan kembali pada Munas V Kadin 2008 tanggal 21-22 Desember 2008 telah menetapkan penyelenggaraan program pemeringkatan bagi Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional yang menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Pemeringkatan bagi Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional bertumpu pada fungsi dan tugasnya dalam pengembangan organisasi, peran dan fungsi di sektor masing-masing, pengembangan layanan dan advokasi bisnis bagi anggota dan hubungan dengan stakeholders seperti Departemen/Dinas terkait dan Kadin Indonesia sebagai induk dunia usaha sesuai UU No 1 Tahun 1987.

Pelaksanaan kegiatan Rating Asosiasi/Himpunan telah dilakukan sosialisasi pada saat pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional pada 25-26 Nopember 2008 di Hotel Sahid Jakarta.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin pasal 6 mengenai Tugas dan Fungsi Kadin
2. Keppres 17 tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, khususnya Anggaran Dasar KADIN pasal 8, 9, 10, 11, 20, 21,23 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 14, 15, 16 dan 20
3. Hasil Rapimnas Kadin 2011 dan Munas VI Kadin 2010

C. TUJUAN DAN OUTPUT

Tujuan :

Menyelenggarakan kegiatan pemeringkatan kinerja program dan layanan Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional secara fungsional dan proporsional guna mendorong peningkatan profesionalitas pengelolaan organisasi, perbaikan citra dan manfaat bagi para anggota, pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*).

Output :

- 1) Peningkatan profesionalitas pengelolaan organisasi Asosiasi/Himpunan
- 2) Meningkatnya peran dan kemampuan dari Asosiasi/Himpunan sebagai representasi sektor bisnis di Indonesia

- 3) Menjadi salah satu tolok ukur dalam rangka pemberian tugas/pendelegasian wewenang yang nantinya akan diberikan oleh Kadin Indonesia kepada Asosiasi/Himpunan.
- 4) Peningkatan komunikasi dan hubungan yang lebih baik lagi antara Kadin Indonesia dengan Asosiasi/Himpunan

D. METODE PENILAIAN

Penilaian dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan penilaian dengan bobot penilaian (prosentase) di tiap tingkatan. Melalui metode ini diharapkan akan tercipta azas "**check & balance**" serta keseimbangan penilaian dari bukti dokumentasi, bukti fisik, bukti penggalian melalui wawancara dan pengambilan keputusan dari sisi organisasi.

Tahap	Fase Penilaian	Bobot	Evidence & Metode
I	Tim Verifikasi & Validasi	40%	Dok fisik, kesesuaian & batas waktu penyerahan. Output : menghasilkan 10 peringkat terbaik
II	Penilai Visit	30%	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan dokumen fisik & verifikasi kembali dokumen yang kurang sesuai pada tahap I • Wawancara dengan stakeholders Kadin Provinsi, yaitu : Pemerintah Daerah dan instansi terkait, Kadin Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Tingkat Provinsi. Output : Penilai visit mengunjungi 10 peringkat terbaik pada tahap I untuk mendapatkan 6 peringkat terbaik
III	Rapat Tim Penilai	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan konvergensi fakta Kadin Provinsi berdasarkan hasil penilaian visit, dengan setiap Tim Penilai mempersentasikan hasil-hasil kunjungan di Kadin Provinsi. • Dilakukan penilaian secara bersama 6 Kadin Provinsi berdasarkan keputusan rapat pleno Tim Penilai. Hal yang dinilai menyangkut non substantif (eksternal faktor) • Menyusun peringkat akhir 1-6 dengan menjumlah penilaian pada Tahap I + Tahap II + Tahap III

			Output : Menyampaikan urutan peringkat 1-6 dan laporannya kepada Bidang OKP TKP
IV	Kadin Indonesia c.q. Bidang OKP TKP	10%	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang OKP TKP Kadin Indonesia melakukan penilaian dari aspek konsistensi & tingkat pelaksanaan peraturan organisasi (kewajiban-kewajiban ke Kadin Indonesia) serta AD ART Kadin • Menambahkan hasil penilaian tahap IV ke tahap sebelumnya sehingga akan diperoleh peringkat akhir (final) 1-6. Output : <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan susunan peringkat akhir • Menetapkan pemenang berdasarkan kategori-kategori tertentu
Jumlah		100%	

Keterangan :

Setiap fase penilaian memberikan nilai dari angka 1 sd 100 sehingga skor akhir adalah :

$$= ((\text{tahap I} \times 30\%) + (\text{tahap II} \times 25\%) + (\text{tahap III} \times 25\%) + (\text{tahap IV} \times 20\%)).$$

E. KATEGORI PEMENANG RATING

Dalam pelaksanaan Rating Kadin Provinsi 2012 ini akan dipilih juara 1, 2 dan 3 serta Asosiasi/Himpunan yang dinyatakan paling inovatif dalam memberikan layanan kepada anggotanya

F. BATAS WAKTU

Untuk menjamin pelaksanaan Rating berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka :

- Batas waktu penyerahan questioner rating adalah 29 Juni 2012.
- Bagi Asosiasi/Himpunan yang tidak menyerahkan questioner sampai dengan mulainya kunjungan Tim Penilai ke Asosiasi/Himpunan tanggal 12 Juli 2012 diberikan nilai 0 (nol).
- Bagi Asosiasi/Himpunan yang menyerahkan questioner rating lebih dari tanggal 1 Juli 2012, maka akan diberikan sanksi pengurangan nilai dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

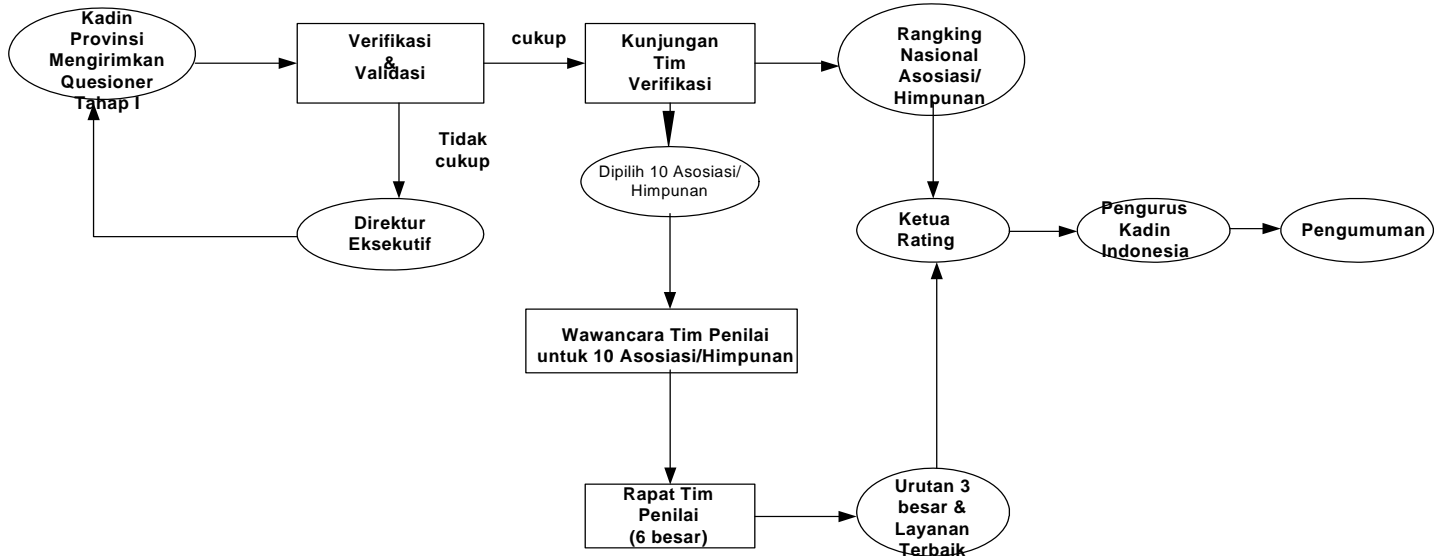
$$\begin{aligned} \text{Poin (Nilai) akhir} &= (\text{Nilai Quesioner} - (\text{Jumlah hari keterlambatan} \times (5))) \\ &= (Y - (A \times 5)) \end{aligned}$$

Keterangan :

A = Jumlah hari keterlambatan

Y = Nilai Quesioner

G. ALUR PROSES RATING



H. METODOLOGI RATING

Dalam pelaksanaan Rating Asosiasi/Himpunan, metodologi rating yang digunakan adalah :

1. Quesioner
 - Responden adalah Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional yang menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia (minimal tahun 2011 sudah diperbaharui).
 - Disusun secara teliti untuk menghindari bias dan di kelompokkan dalam kategori-kategori tertentu.
 - Beberapa materi quesioner dibuktikan dengan adanya data-data pendukung baik harcopy maupun softcopy.
2. Wawancara dan Kunjungan (Pengumpulan Data Langsung)
 - Responden untuk seleksi akhir ini adalah :
 - a. Calon pemenang untuk kategori umum dalam rangka penentuan urutan peringkat 1 sd 6 :
 - Asosiasi/Himpunan untuk melihat fakta-fakta dilapangan antara yang disampaikan dalam Quesioner Tahap I dengan realitas. Departemen terkait sektor Asosiasi/Himpunan jika dapat hadir apda kunjungan Tim Penilai menjadi apresiasi tersendiri dalam pemberian penilaian.
 - b. Calon pemenang untuk kategori Layanan Anggota Terbaik
3. Waktu
 - Pelaksanaan quesioner rating tahap I dilaksanakan serentak mulai tanggal 1 – 5 Juni 2012.

- Wawancara dan kunjungan di 10 Asosiasi/Himpunan untuk penentuan urutan peringkat 6 besar dilakukan pada tanggal 17 Juli – 7 Agustus 2012.

I. BAHAN PENILAIAN

Bahan penilaian dalam Rating Asosiasi/Himpunan adalah:

1. Questioner Rating I

Hasil questioner Rating I akan mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah Asosiasi/Himpunan yang mengikuti kegiatan Rating ini, untuk selanjutnya di ambil 10 (sepuluh) peringkat paling atas akan dikunjungi oleh Tim Verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara apa yang dinyatakan (beserta dokumen) dengan fakta di lapangan.

2. Kunjungan

Kunjungan untuk 10 (sepuluh) Asosiasi/Himpunan yang masuk nominasi dengan fokus pada wawancara mengenai posisi Asosiasi/Himpunan saat ini, program kerja dan pengembangan organisasi Asosiasi/Himpunan di masa mendatang.

I. KRITERIA POKOK DAN PEMBOBOTAN

a). Questioner Tahap I

Materi penilaian pada Questioner Tahap I mencakup 11 (sebelas) kriteria dengan bobot nilai tiap kriteria berbeda. Pembobotan didasarkan atas bobot/beban dari pertanyaan, sehingga setiap butir pertanyaan pada kategori yang sama akan memiliki nilai yang berbeda.

NO	MATERI RATING	JUMLAH PERTANYAAN	BOBOT	TOTAL Max NILAI
1	Pengelolaan Organisasi (<i>Governance</i>)	9	(1 sd 4)	29
2	Hubungan dengan Kadin Indonesia dan Asosiasi Terkait	7	(1 sd 4)	17
3	Penyelenggaraan Program	6	(2 sd 5)	19
4	Keuangan dan Pembiayaan	4	(3 sd 5)	14
5	Hubungan dengan Departemen Sektor Terkait	6	(1 sd 4)	18
6	Advokasi Bisnis Anggota	3	(1 sd 4)	9
7	Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non Anggota	5	(2 sd 5)	20
8	Sarana & Prasarana	11	(1 sd 4)	30
9	Sumber Daya Manusia	5	(3 sd 5)	19
10	Keanggotaan	5	(2 sd 4)	19
11	Kriteria Lain	2	(2 sd 3)	5
Jumlah Nilai Keseluruhan				199

Catatan : Untuk konversi pada skala nilai 100, maka setiap perolehan nilai Asosiasi/Himpunan dibagi $(199/100) = 1,99$.

b). Wawancara dan Kunjungan

Pada kegiatan ini akan dilakukan penilaian di Asosiasi/Himpunan berdasarkan posisi Asosiasi/Himpunan saat ini, program kerja dan pengembangan organisasi Asosiasi/Himpunan di masa mendatang.

J. MATERI RATING

Materi rating terdapat dalam Lampiran (FR – C1).

K. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan rating ini disusun berdasarkan jadwal sebagai berikut:

a. Pengiriman dokumen Rating dari Kadin Indonesia	1 – 5 Juni 2012
b. Pengembalian Form Data Penanggung Jawab dan Contact Person Rating dari Asosiasi/Himpunan	4 Juni – 20 Juni 2012
c. Deadline Penerimaan Dokumen terkait di Kadin Indonesia dari Asosiasi/Himpunan	10 Juni – 29 Juni 2012
d. Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Kadin Indonesia	20 Juni – 1 Juli 2012
e. Kunjungan Tim Penilai	17 Juli – 7 Agustus 2012
f. Rapat Pleno Tim penilai	27 – 28 Agustus 2012
g. Presentasi Tim Penilai pada Rapat Bidang OKP TKP Kadin Indonesia penentuan peringkat akhir	30 Agustus 2012
h. Penentuan peringkat akhir	30 Agustus 2012
i. Pengumuman/ publikasi Hasil Pemeringkatan	Rapimnas Kadin 2012

L. PENGUMUMAN HASIL RATING

Hasil rating adalah berupa daftar peringkat Asosiasi/Himpunan Indonesia yang disusun berdasarkan total poin penilaian yang dihasilkan. Piagam penghargaan diberikan bagi Asosiasi/Himpunan yang menduduki peringkat 1 sd 3.

Setiap Asosiasi/Himpunan akan mendapatkan informasi hasil rating dari Kadin Indonesia dalam bentuk pemberitahuan tertutup kepada setiap Asosiasi/Himpunan yang mencakup pula saran-saran dalam rangka peningkatan kinerja dan layanan Asosiasi/Himpunan.

M. INFORMASI PENTING BAGI ASOSIASI/HIMPUNAN

Untuk memperoleh penilaian yang baik disarankan bagi Asosiasi/Himpunan untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bukti-bukti kegiatan diberikan nilai tinggi untuk 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2010-2011. Jika mampu menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2012 akan mendapatkan kredit poin tersendiri. Bukti-bukti kegiatan dapat berupa hardpaper, CD, Film dan lainnya. Tahun pembuktian kegiatan paling lama yang diakui adalah tahun 2008 dengan pemberian nilai minimal.
2. Jangan menunggu dokumen pendukung kuesioner tersedia semua, segera kirimkan ke Panitia Rating Kadin Indonesia jika 70% dokumen pendukung sudah tersedia (dihitung dari jumlah jawaban Asosiasi/Himpunan yang membutuhkan dokumen pendukung). Bagi Asosiasi/Himpunan yang mengirimkan dokumen pendukung melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan pengurangan nilai.
3. Pada saat kegiatan kunjungan lapangan bagi Asosiasi/Himpunan yang masuk nominasi, lihat kembali hasil verifikasi yang diberikan oleh Panitia Rating Kadin Indonesia. Pastikan Pengurus Asosiasi/Himpunan yang dirasakan kompeten terhadap hal-hal yang membutuhkan penjelasan dalam rangka memperkuat kuesioner yang telah diverifikasi hadir.
4. Buat check list internal terhadap hal-hal yang akan ditunjukkan kepada Tim Penilai, supaya tidak ada hal-hal yang terlewat.

II. PENJELASAN MATERI RATING

Materi rating dibagi menjadi 11 (sebelas) kategori dengan harapan dapat memberikan potret diri Asosiasi/Himpunan secara menyeluruh baik dari sisi organisasi, pelayanan keanggotaan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait Pemerintah, efektifitas advokasi bisnis dalam rangka keterwakilan aspirasi anggota. Kenyamanan bekerja dalam bentuk perlindungan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta lingkungan bekerja yang kondusif, tidak kalah pentingnya adalah kompetensi karyawan yang dijabarkan dalam prosedur dan instruksi kerja yang jelas dan terukur. Secara rinci penjelasan untuk setiap kategori materi rating sebagai berikut :

1. Pengelolaan Organisasi

Pertanyaan ini dalam upaya melihat apakah pelaksanaan organisasi Asosiasi/Himpunan sudah sesuai untuk aspek:

- a. Sesuai dengan ketentuan AD/ART setiap Asosiasi/Himpunan.
- b. Menerapkan pengelolaan organisasi yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern serta memberikan reward dan punishment untuk setiap keberhasilan dan kegagalan/pelanggaran dalam menjalankan amanah.
- c. Penerapan sistem manajemen mutu yang baik dalam rangka pengelolaan organisasi.

2. Hubungan dengan Kadin Indonesia & Asosiasi Terkait

Sebuah organisasi akan kuat dan berjalan dengan baik jika mampu melakukan pembinaan dan mensinergikan kegiatannya dengan jajaran organisasi dunia usaha lainnya. Sebagai salah satu pilar dari Kadin Indonesia, maka hal-hal yang ingin digali adalah :

- a. Komposisi anggota Asosiasi/Himpunan yang menjadi anggota Kadin. Tujuannya adalah mendapatkan basis data perusahaan untuk kepentingan pengembangan dunia usaha serta pemenuhan dari UU No 1/1987 mengenai keanggotaan Kadin.
- b. Menurut Keppres 17/2010 Kadin mengurus lintas sektoral dan Asosiasi mengurus sektoral. Sehingga setiap informasi dari asosiasi akan menjadi informasi yang penting bagi Kadin Indonesia dalam rangka menyuarakan aspirasi tersebut.
- c. Setiap Asosiasi/Himpunan yang menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia akan dilibatkan dalam forum dunia usaha tingkat nasional. Keputusan Munas, Rapimnas Kadin diharapkan dapat disosialisasikan ke segenap perusahaan yang menjadi anggota Asosiasi/Himpunan.

3. Penyelenggaraan Program

Keberhasilan sebuah organisasi adalah jika mampu melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik. Dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan terus menerus (continual improvement), maka prinsip-prinsip **Plan, Do, Check, Act** menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, pengendalian, monitoring serta analisis.

Apakah Asosiasi/Himpunan melakukan penyusunan program kerja yang baik dan mencerminkan program kerja yang terukur, termanajemen dengan baik dan memiliki output yang jelas.

4. Keuangan dan Pembiayaan

Dalam upaya menjalankan organisasi Asosiasi/Himpunan, ketersediaan dana yang mencukupi dan sumber yang teratur/rutin adalah sangat dibutuhkan. Pertanyaan nomor 23 mendeskripsikan sumber-sumber dana Asosiasi/Himpunan beserta persentasenya sebagai upaya melihat bagaimanakah sumber pembiayaan.

Pertanyaan nomor 24 mendeskripsikan penggunaan dari dana yang diperoleh. Jumlah dana yang minimal tentunya akan habis digunakan untuk kebutuhan operasional dan kesekretariatan. Sebaliknya dengan jumlah dana yang besar dan sumber dana yang didukung oleh kegiatan layanan yang baik dan anggota yang besar, maka selain untuk pembiayaan rutin dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang berorientasi program.

Pertanyaan nomor 26 mengupas mengenai dana abadi, yang menjadi penting bagi organisasi, karena menjadi sumber dana yang akan ada secara terus menerus ditengah naik-turunnya penerimaan dari iuran anggota, kegiatan layanan yang tidak kontinyu (insidental), dan sumber lainnya. Meskipun jumlah dana abadi kecil, tetap memberikan peran yang sangat penting karena ada kepastian dana ditengah naik-turunnya dinamika organisasi Kadin.

Pelaksanaan organisasi yang menjunjung tinggi *"Good Governance"* menjadi mutlak pada saat ini. Laporan keuangan tahunan Kadin Provinsi yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan wujud dari pelaksanaan organisasi yang transparans, kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

Hubungan dengan Lembaga Pemerintah dapat berupa Departemen Terkait/teknis yang sesuai dengan sektor usaha asosiasi ataupun lembaga lainnya. Hubungan ini dalam rangka proses lobi dan pelaksanaan regulasi Pemerintah di masing-masing sektor. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Asosiasi/Himpunan harus memiliki mekanisme untuk menampung aspirasi anggota, mengolah dan menyampaikan kepada Pemerintah.

Sarana komunikasi yang efektif dan efisien menjadi tuntutan supaya pengumpulan aspirasi dari anggota, dan penyampaian kepada Pemerintah maka Asosiasi/Himpunan dituntut untuk memiliki mekanisme yang bisa mendukung dan pelaksanaannya. Frekuensi penyampaian opini dan pendapat Asosiasi/Himpunan dalam memberikan masukan kepada Departemen Terkait/Teknis ataupun Pemerintah Daerah merupakan indikator dari berjalan efektifnya penampungan aspirasi anggota dan pengolahan/penjabaran aspirasi tersebut.

6. Advokasi Bisnis Anggota

Salah satu alasan keikutsertaan perusahaan sebagai anggota Asosiasi/Himpunan adalah untuk memajukan dan perlindungan terhadap usahanya. Sehingga sangat diharapkan adanya kontribusi Asosiasi/Himpunan dalam rangka mendorong kegiatan usaha anggotanya. Advokasi bisnis menjadi salah satu kebutuhan perusahaan antara lain dalam rangka penyelesaian sengketa antar anggota Asosiasi/Himpunan ataupun dengan patner usaha baik dari dalam maupun luar

negeri. Wujud dari kepedulian Asosiasi/Himpunan dalam advokasi bisnis anggota adalah adanya pengurus yang membidangi kegiatan tersebut.

7. Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non Anggota

Layanan bisnis kepada Anggota dan Non Anggota merupakan representasi dari eksistensi Kadin dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha, sekaligus sebagai bagian dari kegiatan income generating. Semakin tinggi jumlah dan kualitas layanan bisnis kepada Anggota dan Non Anggota menunjukkan semakin baiknya peran Kadin bagi dunia usaha. Layanan bisnis yang dikelola dengan baik akan menjadi income generating yang kontinyu dan handal untuk menjadi sumber pemasukan sebuah organisasi.

Selain berhubungan dengan pendapatan usaha, layanan bisnis juga menjadi upaya Asosiasi/Himpunan meningkatkan citra di mata stakeholders dan menjaring anggota lebih banyak lagi.

8. Sarana dan Prasarana

Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu kunci berjalannya sebuah organisasi, termasuk didalamnya adalah Asosiasi/Himpunan. Sarana prasarana yang cukup akan menciptakan kondisi bekerja yang nyaman dan lebih menjamin kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Kegiatan dapat berupa kegiatan layanan, operasional dan lainnya.

Kriteria sebuah sarana dan prasarana dikatakan cukup adalah dengan melihat rasio sarana prasarana tersebut dibandingkan dengan jumlah SDM, kualitas dan keandalan perlengkapan yang ada, perlengkapan rapat yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pelatihan, seminar dan lainnya, serta teknologi terkini yang banyak digunakan seperti internet dapat diakses sewaktu-waktu.

Untuk menunjang mobilitas pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pengurus maupun Sekretariat, maka keberadaan kendaraan operasional menjadi sarana yang harus dimiliki oleh Kadin Provinsi.

9. Sumber Daya Manusia

Bagaimanapun juga lengkapnya sarana prasarana tidak akan bermanfaat secara maksimal jika SDM yang menggunakannya memiliki kompetensi (skill) yang rendah dalam memanfaatkan sarana prasarana maupun kemampuan untuk merancang dan menjalankan sebuah program/kegiatan.

Staff yang berkualitas seyogyanya juga dilindungi dengan aturan normatif yang menjadi hak setiap karyawan.

10. Keanggotaan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa keanggotaan merupakan urat nadi sebuah organisasi. Jumlah anggota yang besar menunjukkan representasi Asosiasi/Himpunan sebagai perwakilan sebuah sektor usaha. Keanggotaan yang besar juga memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Asosiasi/Himpunan.

Upaya untuk meningkatkan ataupun mempertahankan jumlah anggota tentunya membutuhkan kiat dan program yang baik antar lain melalui servis (layanan) yang baik ke anggota dan lainnya.

Program promosi keanggotaan menjadi sebuah cara bagi Asosiasi/Himpunan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggotanya. Pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan peningkatan jumlah perusahaana yang menjadi potensi anggota sebuah Asosiasi/Himpunan.

Peningkatan suara Asosiasi/Himpunan dari 20% menjadi 30% pada Munas VI Kadin terdapat persyaratan Asosiasi/Himpunan untuk mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Kadin. Realiasi ini perlu diperiksa, sehingga dapat memberikan masukan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dalam menentukan mekanisme Konvensi Asosiasi/Himpunan.

11. Kriteria Lainnya

Kriteria lainnya ditujukan pada kegiatan Asosiasi/Himpunan yang bersifat sosial kemasyarakatan, baik kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat ataupun bekerjasama dengan organisasi/LSM. Jika Asosiasi/Himpunan melaksanakan peran-peran ini, tentunya akan meningkatkan citra Kadin Provinsi di masyarakat luas.

III. PANDUAN MENGISI RATING

1. Pengisian Quisioner

Penilaian dilakukan berdasarkan dokumen yang diterima oleh Panitia Rating Kadin Indonesia. Diharapkan setiap Asosiasi/Himpunan hendaknya mengisi quisioner rating sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnyanya. Sebagai panduan mengisi, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pertanyaan yang "tidak diisi" dianggap mengisi dengan jawaban yang salah, dan mendapatkan skor 0 (nol).
2. Setiap pertanyaan yang dimintakan/dipersyaratkan untuk melampirkan dokumen pendukung, maka dokumen pendukung tersebut harus ada. Setiap pertanyaan kategori ini tanpa dokumen pendukung, maka diberikan skor 0 (nol).
3. Besaran nilai yang ada pada jawaban "ya" dan "sebagian" adalah nilai maksimal. Jika Tim Penilai melihat dokumen pendukung "kurang relevan", maka nilai yang diterima tidak maksimal. Jika dokumen pendukung "tidak relevan", maka akan diberikan skor 0 (nol).
4. Jika ada pertanyaan yang tidak mensyaratkan dokumen pendukung, tetapi Asosiasi/Himpunan memberikan dokumen pendukung, maka tidak akan menambah nilai. Manfaat yang diperoleh adalah akan menjadi salah satu referensi penentuan peringkat jika ada skor yang sama antar Asosiasi/Himpunan.
5. Legalitas (keaslian) dokumen pendukung menjadi salah satu pertimbangan bagi Tim Penilai dalam memberikan skor.

2. Data Pendukung

Bentuk data pendukung dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu : hardcopy (paper) dan softcopy (file). Setiap dokumen supaya diberikan kode/penamaan untuk memudahkan Tim Penilai Rating Kadin Indonesia dalam menganalisisnya. Dokumen pendukung diberikan kode dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada pojok kanan atas diberikan kode dokumen (tulis tangan atau print/ketik)
- b. Dokumen pendukung di kelompokkan dalam setiap kategori pertanyaan.
Sebagai contoh dokumen pendukung kategori : Pengelolaan Organisasi
 - Maka diberikan cover/sampul dengan tulisan : Dokumen Pengelolaan Organisasi.
- c. Pemberian kode untuk setiap pertanyaan yang membutuhkan dokumen pendukung diatur sebagai berikut :
Pengelolaan organisasi adalah kategori pertanyaan I (angka romawi), maka dokumen pendukung di pojok atas diberikan kode : kategori pertanyaan/no urut pertanyaan. Sebagai contoh dokumen pendukung pertanyaan Kategori Pengelolaan Organisasi pada pertanyaan nomor 3, maka kode dokumen pendukung pada pojok kanan atas adalah I/3
- d. Bagi dokumen dalam bentuk CD/disket, maka nama file untuk setiap dokumen pendukung mengikuti ketentuan dokumen hardcopy. Sekiranya dalam file tidak bisa disimpan karena tidak boleh kode "/" maka dapat diganti dengan kode "-" (minus).
- e. Bagi dokumen yang ada di website, maka Asosiasi/Himpunan menginformasikan alamat URLnya.

IV. KORESPONDENSI

Koresponden dalam pelaksanaan Rating:

a. Surat

Direktur Eksekutif Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 29
Jl. HR. Rasuna Said, X-5, Kav 2-3
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021) 5274484
Fax : (021) 5274331-32

b. Email

rating@kadin-indonesia.or.id

Buku panduan rating beserta kuisisioner dan form-formnya dapat di download di website Kadin Indonesia dengan alamat : www.kadin-indonesia.or.id

V. SUSUNAN PANITIA RATING

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Umum
Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan
Daerah dan Tata Kelola Perusahaan

Panitia Pengarah

Ketua : Rakhmat Junaidi

Wakil Ketua : - A Riza Patria
- Ibnu Munzir

Anggota : - Suryani Motik
- Cyril Nurhadi
- Erry Firmansyah
- Rambun Tjajo
- William Marpaung
- Arifin Dimiyati
- Syamsul Munir

Tim Penilai

Ketua : Ruben Tumade

Wakil Ketua : - Andi Sinulingga
- Hengky Purwoko
- Junaidi Elvis
- Herman Heru Suprobo

Anggota : - Hardini Puspasari
- Natashra Lufti Ismail
- Frans Buce Pangaribuan
- Panji S. Choesin

Panitia Pelaksana

Ketua Pelaksana : Rahardjo Jamtomo

Wakil Ketua : - Sutrisno
- Miftahul Hakim

Sekretaris : Arief Hermawan

Bendahara : Suprayitno

Anggota : - Tri Jayanti
- Sunarti
- Suwarno